

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Reformasi Keuangan Negara di Indonesia ditandai dengan terbitnya tiga Undang-undang Bidang Keuangan Negara. Ketiga Undang-undang ini mengamanatkan pentingnya pengelolaan keuangan negara secara akuntabel, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*good governance*) sebagaimana yang telah dikembangkan dan diterapkan di berbagai sektor privat. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Konsep ini dilakukan untuk mengurangi serta menghilangkan kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan profesional, dibentuklah Proyek Manajemen Keuangan Pemerintah dan Administrasi Pendapatan (*Government Financial Management and Revenue Administration Project*, GFMRAP). Salah satu bagian dari GFMRAP adalah pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang merupakan bagian dari sistem informasi pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi (*Integrated Financial Management Information System*, IFMIS).

Tujuan dari implementasi IFMIS antara lain ialah untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat penggunaan sistem manual atau sistem yang terpisah-pisah dalam pengelolaan anggaran serta dalam proses akuntansinya. Aplikasi SPAN diimplementasikan pada BUN yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara. Setelah SPAN berhasil di lingkup Kementerian Keuangan, selanjutnya implementasi IFMIS dilanjutkan pada tingkat Kementerian/Lembaga.

Pada tingkat Kementerian/Lembaga, implementasi IFMIS diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan proses bisnis akan penyesuaian pada sistem informasi yang digunakan oleh BUN dan K/L dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Aplikasi ini dinamakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau SAKTI. Berdasarkan PMK Nomor 159/PMK.05/2018, aplikasi SAKTI adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada instansi pemerintah yang meliputi tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Implementasi SAKTI diamanatkan dalam PMK Nomor 223/PMK.05/2015 dan PMK Nomor 131/PMK.05/2016. Diawali dengan tahapan uji coba terbatas (*piloting*) dimulai dari tahun 2015. Pada tahap *piloting* awal, hanya difokuskan pada satker lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), lalu selanjutnya difokuskan pada satker di lingkup Kementerian Keuangan, dan pada *piloting* tahap selanjutnya difokuskan pada 5 Kementerian/Lembaga yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pemberantas Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut penelitian Sutiono & Taufiqurahman (2020) hingga tahun 2019 sebagian besar satker Kementerian Negara/Lembaga masih menggunakan aplikasi *existing* dalam pengelolaan keuangannya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 seluruh satker Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2022 akan sepenuhnya menggunakan aplikasi SAKTI secara penuh sebagai sistem pengelolaan keuangan negara.

Nasrudin (2017) menyebutkan masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan fitur aplikasi yang rumit karena dinilai terlalu canggih, sinyal internet yang tidak stabil, minimnya pelatihan teknis, kurang komunikasi antar admin dengan operator, dan masalah-masalah lainnya. Menurut Amriani & Iskandar (2019) penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengukur sejauh mana kesuksesan implementasi SAKTI yang telah berjalan selama ini. Penelitian didasarkan pada sudut pandang pengguna sebagai sistem yang bersifat *mandatory* sehingga dengan model kesuksesan sistem informasi diharapkan akan menghasilkan rekomendasi kebijakan terhadap implementasi SAKTI yang lebih efektif di masa yang akan datang.

Dari penelitian sebelumnya, masih sedikit ditemukan yang membahas suatu keberhasilan roll out SAKTI dari sudut pandang KPPN sebagai pembina. Mengingat hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya tulis dengan judul “ANALISIS KEBERHASILAN ROLL OUT SAKTI PADA SATKER DI LINGKUP KPPN BANDAR LAMPUNG”. Karya tulis ini diharapkan bermanfaat terkhusus bagi KPPN Bandar Lampung dalam meningkatkan keberhasilan roll out

SAKTI, kepentingan penelitian di masa yang akan datang, dan penulis sendiri dalam pengembangan ilmu yang didapat selama penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dikaji untuk karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah rencana KPPN Bandar Lampung dalam mengimplementasikan roll out SAKTI pada satker?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan roll out SAKTI pada satker di lingkup KPPN Bandar Lampung?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan KPPN Bandar Lampung agar roll out SAKTI berhasil?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terurai di atas, tujuan penulisan atas karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui rencana KPPN Bandar Lampung dalam mengimplementasikan roll out SAKTI pada satker.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan roll out SAKTI pada satker.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPPN Bandar Lampung dalam mewujudkan keberhasilan roll out SAKTI.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya di satu wilayah kerja KPPN, yaitu KPPN Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.91, Tj.

Gading, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung. Tempat penelitian ini dipilih karena relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoretis maupun praktis, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai sistem informasi akuntansi pemerintah tentang keberhasilan roll out SAKTI pada satker di ruang lingkup KPPN Bandar Lampung, serta diharapkan dapat dijadikan sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoretis didapatkan selama pendidikan di PKN STAN.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya tulis ini dapat menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan roll out SAKTI pada satker di ruang lingkup KPPN Bandar Lampung.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan bermanfaat dalam membantu sebagai bahan masukan kepada peneliti selanjutnya dalam melakukan analisis keberhasilan SAKTI pada satker-satker yang ada di Indonesia.

c. Bagi satker di lingkup KPPN Bandar Lampung

Karya tulis ini diharapkan dapat meninjau dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan roll out SAKTI bagi satker di lingkup KPPN Bandar Lampung.

1.6 Sistematika Penulisan

BABI PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan uraian mengenai latar belakang objek karya tulis, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan karya tulis, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Teori yang akan dibahas meliputi pengertian sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi pemerintah serta perkembangan sistem aplikasi yang digunakan pemerintah di Indonesia.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui metode wawancara dan metode studi kepustakaan, memberikan profil singkat mengenai objek karya tulis, struktur organisasi. Kemudian berdasarkan landasan teori yang digunakan pada bab II akan digunakan sebagai dasar pembahasan mengenai pelaksanaan analisis keberhasilan roll out SAKTI pada satker di lingkup KPPN Bandar Lampung.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan dari bahasan analisis keberhasilan roll out SAKTI pada satker di lingkup KPPN Bandar Lampung yang telah penulis lakukan tinjauan pada bab-bab sebelumnya dan juga memuat saran-saran agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada.